

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MAKASSAR

Alfiansyah^{1*}, Ansyari Mone², Riskasari³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to determine the effectiveness of services for granting building permits in the one-stop integrated licensing service office (DPMPTSP) in Makassar city. This study used a qualitative research with a descriptive type. The number of informants in this study were 7 people who were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results showed that regarding the optimization aspects of the objectives to be achieved by the Makassar City PTSP Service, it had provided services to the community by facilitating the form of management so that it was well served, the aspects of interaction between the organization and the surrounding environment related to the effectiveness of IMB services by the Makassar City PTSP Service certainly consisted of several methods such as, conducting awareness, capacitating, and empowering, and aspects of the role of individual behavior on effectiveness in an organization, namely how the Makassar City DPM-PTSP Service provided excellent service and becomed a stakeholder following community service SOPs.

Keywords: service effectiveness, granting building permits

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang yang ditentukan dengan tehnik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai aspek optimasi tujuan yang akan dicapai Dinas PTSP Kota Makassar telah memberikan layanan kepada masyarakat dengan mempermudah bentuk pengurusan sehingga terlayani dengan baik, aspek interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitar terkait efektivitas pelayanan pemberian IMB oleh Dinas PTSP kota Makassar tentunya terdiri dari beberapa metode seperti, melakukan penyadaran, pengkapasitasan, serta pendayaan, dan aspek peran perilaku individu terhadap Eektivitas dalam suatu Organisasi yakni bagaimana Dinas DPM-PTSP kota Makassar memberikan pelayanan prima serta menjadi stakeholder yang mengikuti SOP pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: efektivitas pelayanan, pemberian izin mendirikan bangunan

* alfiansyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Era Otonomi Daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ternyata mampu membawa efek yang besar terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di daerah. Dengan adanya sistem kewenangan yang kini bersifat desentralistis, masing-masing daerah seolah dituntut untuk dapat mempertahankan eksistensi rumah tangga mereka dengan berpondasi pada kemampuan dan kemauan mereka sendiri. Kemampuan dalam artian menyangkut aspek sumber daya- sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemauan menyangkut seberapa keras pimpinan daerah memiliki motivasi untuk melejitkan potensi-potensi daerahnya yang mungkin saja “terpendam” selama ini.

Dapat dikatakan bahwa di era otonomi daerah ini peran Kepala Daerah sangat menentukan seberapa pesat kemajuan suatu daerah seperti halnya dalam penataan tata ruang Kota Makassar Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar sebagai kota metropolitan seperti sekarang ini memiliki kemajuan yang begitu pesat. Kemajuan tersebut seiring dengan

banyaknya investor-investor yang masuk di kota ini. Pemerintah Kota Makassar tentu tidak tinggal diam dalam menanggapi kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Kota Makassar giat melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik khususnya dipelayanan perizinan salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dimana Dinas Tata Ruang kota Makassar yang berperan aktif dalam penataan Ruang kota diukur dalam efektivitas kinerja yang mampu mencapai hasil maksimal sesuai dengan tujuan dan sasaran kerja yang ditetapkan dimana Dinas Penataan ruang kota Makassar membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Dinas atau instansi tersebut. Namun dari segi peraturan atau pelayanan yang diberikan pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Penataan Ruang Kota Makassar masih banyak di temukan kasus-kasus seperti pelanggaran bangunan Kota seperti ditemukannya beberapa bangunan yang melewati garis sempadan jalan, padahal diketahui garis sempadan jalan sangat penting karena berfungsi sebagai tempat

parkir kendaraan.

Menurut Dessler (2011) manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasi penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Baird (2011) manajemen kinerja adalah suatu proses kerja dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus.

Costello (2010) mengatakan manajemen kinerja merupakan dasar dan kekuatan pendorong yang berada dibelakang semua keputusan organisasi, usaha kerja dan alokasi sumber daya. Sedangkan Udekusuma (2013) mengatakan manajemen kinerja merupakan suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu sedemikian rupa, sehingga baik tujuan individu maupun tujuan perusahaan dapat bertemu. Pencapaian individu sekaligus pencapaian perusahaan merupakan tujuan dari manajemen kinerja yang seharusnya berjalan seksama dan saling berkaitan erat.

Menurut Direktorat Jenderal Anggaran (2015) manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi aspek-aspek yang menunjang keberadaan organisasi. Dari semua penjelasan para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen kinerja merupakan proses kerja yang mengacu pada kinerja sumber daya sehingga dapat menciptakan visi dan tujuan organisasi secara bersama-sama.

Efektivitas (effectiveness) secara umum dapat diartikan “melakukan sesuatu yang tepat” (Stoner, 2013). Menurut Yukl (2015) efektivitas diartikan berkaitan dengan tepat tidaknya pemilihan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang direncanakan. Pengelolaan sebuah

organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut (Danim, 2011).

Pendapat lain dikemukakan Robbins (2015) yang mengatakan efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk memilih atau melakukan sesuatu yang paling sesuai atau tepat dan mampu memberikan manfaat secara langsung. Ukuran penilaian yang digunakan adalah tepat tidaknya organisasi atau perusahaan menjalankan segala sesuatu misalnya pelaksanaan program atau aktivitas.

Efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Pendapat ini didukung Danim (2011) yang mengatakan efektivitas kinerja kelompok, berkaitan dengan kemampuan anggota-anggota untuk memilih atau melakukan sesuatu yang tepat demi kepentingan bersama.

Efektivitas kinerja akan

meningkat apabila seseorang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan kerja. Efektivitas kinerja individu dapat diukur dari keterampilan kerja, peningkatan prestasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan mampu menghadapi perubahan (Bass dan Daft, 2010).

Timpe (2010) mengungkapkan kinerja yang baik dari individu akan menggambarkan kinerja organisasi, kinerja individu sangat mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan. Kinerja organisasi menjadi buruk apabila individu berkemampuan rendah dan upaya pengembangan keterampilan dan keahliannya juga rendah. Sebaliknya, kinerja yang baik dari seseorang akan mampu meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan.

Soeprihanto (2010) mengatakan efektivitas kinerja berkaitan erat dengan prestasi kerja seseorang. Efektivitas kinerja dan prestasi tidak hanya dinilai dari hasil secara fisik tetapi juga mencakup pelaksanaan kerja secara keseluruhan yang meliputi kemampuan kerja, hubungan kerja, disiplin kerja, prakarsa dan kepemimpinan. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan merupakan salah satu indikator kinerja yang efektif dan prestasi yang tinggi. Perencanaan

efektivitas kinerja dan prestasi didahului dengan perencanaan cara mencapainya dan menetapkan tujuan yang akan dicapai. Fungsi pengorganisasian menjelaskan tanggung jawab dan wewenang individu dalam organisasi sedangkan fungsi pengarahan menjelaskan panduan pencapaian hasil dalam bentuk interaksi yang lebih berorientasi pada psikologi individu dalam organisasi. Sementara fungsi pengendalian menjelaskan kemampuan individu untuk menjamin konsistensi hasil aktual dengan yang telah direncanakan.

Lebih lanjut Steers (2010) mengatakan bahwa untuk menilai efektivitas mencakup 3 sudut pandang yaitu : (1) optimasi tujuan yang akan dicapai yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian dan alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar, (2) interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Dalam perspektif ini lebih menekankan pentingnya arti interaksi organisasi dengan lingkungan. Bagaimana memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang ada didalam organisasi maupun diluar organisasi, (3) penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses mencapai

tujuan organisasi dan dalam efektivitas suatu organisasi. Menganalisis tingkahlaku dan peran individu terhadap organisasinya, yang pada akhirnya yang menjadi penyebab atau yang menghalangi tercapainya tujuan organisasi.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud structural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.

Menurut Tarmidzi, bahwa berbagai bentuk perencanaan tata ruang wilayah dalam suatu daerah, maka perlu ditetapkan adanya peraturan pemerintah. Bentuk kongkrit dari

peraturan pemerintah yang dimaksud dari Peraturan Daerah Dalam pelaksanaan pembuatan bangunan telah di ataur dalam PERDA (Peraturan Daerah) Kota Makassar No. 15 Tahun 2004 tentang Tata Bangunan, di dalam peraturan tersebut telah di tetapkan berbagai macam aturan mengenai penataan ruang tata bangunan kota makassar. Pada dasarnya izin merupakan suatu ketetapan pejabat tata usaha negara yang berwenang, yang isi atau substansinya memiliki sifat.

Secara yuridis, pengertian izin dan perizinan tertuang dalam pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalam pasal 1 angka 8, dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian di dalam pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Salah satu prinsip negara hukum ialah pemerintahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kewenangan dalam fungsi pengaturan. Dari fungsi tersebut, muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi beberapa peristiwa yang bersifat individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 01 April 2019. Penelitian ini dilakukan di Dinas DPMPSTP Kota Makassar. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi didasarkan karena instansi tersebut yang menangani masalah tata pembangunan Kota Makassar. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian

didasarkan atas efektivitas, waktu, dana serta kemudahan akses dalam mengumpulkan data-data penelitian karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Dinas DPMPTSP Kota Makassar mengenai bangunan yang melewati garis sepadan jalan.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana mengetahui efektivitas kinerja Dinas DPMPTSP Kota Makassar mengenai bangunan yang melewati garis sepadan jalan.

Selama melakukan penelitian, penulis mengumpulkan informasi mengenai *teknik purposive sampling* dengan kriteria yaitu mempunyai pemahaman dengan masalah yang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah kepala dinas PTSP Kota Makassar, Kabid pelayanan belakang perizinan teknis, Kabid pelayanan depan perizinan, Masyarakat. Adapun alasan saya memilih ke 3 informan dibawa ini karena sudah sangat cukup efektif melakukan penelitian walaupun hanya sedikit informan yang saya gunakan bukan berarti bahwa saya katakan lebih bagus

namun inilah sesuai dengan apa yang saya lakukan pada saat proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C. Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari

permukaan laut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. dan Peraturan Walikota Makassar S Nomor 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2019, wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 km²), Mamajang (2,25 km²), Tamalate (20,21 km²), Rappocini (9,23 km²), Makassar (2,52 km²), Ujung Pandang (2,63 km²), Wajo (1,99 km²), Bontoala (2,10 km²), Ujung Tanah (5,94 km²), Tallo (5,83 km²), Panakkukang (17,05 km²), Manggala (24,14 km²), Biringkanaya (48,22 km²), Tamalanrea (31,84 km²) dan Kep. Sangkarrang (1.54 km²).

Pemerintahan Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober

1999 berubah kembali namanya menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Secara administratif Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar merupakan sebuah instansi yang memberikan jasa pelayanan publik di sektor perizinan.

"Pembentukan DPM-PTSP atau yang dulunya dikenal sebagai Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) ini adalah jawaban atas kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan adanya sistem perizinan yang lebih kondusif," terang Kepala DPM-PTSP Makassar Andi Bukti Djufri, Jumat (24/2/2017). Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan sistem pelayanan di sektor perizinan. Maka Wali Kota Makassar menetapkan DPM-PTSP sebagai tempat pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan satu pintu.

Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat IMB memiliki peran penting bagi pembangun rumah. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan kepastian hukum pada bangunan yang dibangun

sehingga ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengakibatkan gangguan atau hal yang merugikan kepentingan orang lain. Salah satu dasar hukum penyelenggaraan perizinan mendirikan bangunan adalah Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan mengenai pelayanan perizinan di atur pula dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar serta dalam upaya Pemerintah kota makassar khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota makassar untuk mencegah terjadinya praktik Pungutan Liar (PUNGLI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan, baik oleh oknum aparat pemerintah maupun yang mengatasnamakan aparat pemerintah.

Optimasi Tujuan yang Akan Dicapai

Suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai). Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah

ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar m Udekusuma.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) mendominasi izin yang terbit pada awal 2018 ini. Data yang dihimpun dari DPMPTSP Makassar, ada 2.049 SIUP yang diterbitkan pada periode Januari-Maret. Dan periode yang sama diterbitkan 2.047 TDP. Dimana, DPMPTSP Makassar menangani 17 item izin usaha. Kendati demikian, jenis izin tersebut belum mencakup di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Sekarang ini, sudah hampir seratus izin kalau diurai dari masing-masing izin yang ada di SKPD,” tutur Andi Bukti Djufrie, Kepala DPMPTSP Makassar, Rabu 4 April 2018. Menurutnya, SIUP-TDP memang paling mendominasi izin yang ada di Makassar. Hal ini menunjukkan masyarakat di Kota Makassar banyak yang ingin berwirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat diketahui optimasi Pelayanan dalam pemberian izin khususnya IMB itu tentunya memiliki tingkat kesuksesan berdasarkan target yang menjadi sasaran pelayanan, tentunya mengedepankan

pelayanan prima sehingga tidak ada yang di rugikan. Menurut narasumber Dinas PTSP kota Makassar sudah memaksimalkan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja yang ingin mendirikan bangunan dan mengurus Izinnya tentunya dengan memperhatikan semua persyaratan yang ada maka dari itu masyarakat yang ingin mengurus IMB harus memperhatikan syarat yang di berikan oleh pemerintah khususnya dalam mengurus izin di Dinas PTSP kota Makassar agar memiliki timbal balik yang positif dan tidak ada pihak yang di rugikan.

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat diketahui optimasi Pelayanan dalam pemberian izin khususnya IMB itu tentunya mengedepankan pelayanan prima sehingga SOP pelayanan di kantor Dinas PTSP kota Makassar itu berjalan dengan baik dan masyarakat juga sebagai konsumen merasa lebih puas dengan layanan yang di berikan pemerintah khususnya di Dinas PTSP kota Makassar. Menurut narasumber bahwa hampir semua bidang bersentuhan dengan pelayanan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pelayanan kepada masyarakat di kantor Dinas PTSP kota Makassar menjadi ukuran sangat penting dalam pelayanan

publik yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan diatas dengan beberapa informan di atas, maka disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan Dinas PTSP Kota Makassar dalam pencapaian optimasi tujuan yakni pelayanan dalam memberikan izin mendirikan bangunan tentu saja tidak hanya melibatkan Dinas PTSP Kota Makassar saja namun juga melibatkan SDM dari segi masyarakat karena mereka adalah konsumen yang tentu saja membutuhkan izin apa lagi jika ingin mendirikan bangunan, Dinas PTSP Kota Makassar sendiri telah memberikan kemudahan kepada siapa saja dalam melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan. Dari segi optimasi pelayanan pemberian izin dapat kita simpulkan bahwa Dinas PTSP Kota Makassar sudah berusaha untuk melaksanakan pemenuhannya selaku pelayan masyarakat khususnya di bidang pemberian izin tidak serta merta memberikan kemudahan namun juga memberikan syarat untuk lebih di permudah dalam melakukan pengurusan di Dinas PTSP Kota Makassar.

Interaksi Antar Organisasi dengan Lingkungan Sekitar

Hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitar. Terdapat hubungan yang erat antara organisasi dengan lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menginterpretasikan dan merespon kondisi (perubahan yang terjadi) lingkungan organisasi. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan organisasi akan menghasilkan organisasi sebagai sebuah sistem. Di mana sistem organisasi dipengaruhi oleh sub-sub sistem yang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang keduanya akan sangat berhubungan. Sistem organisasi yang terbentuk dapat berupa: (1) organisasi sistem tertutup, yaitu suatu organisasi yang membatasi diri dari interaksi dengan lingkungan di luar organisasi, yang berarti cenderung mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar. Penggunaan sistem tertutup dewasa ini banyak dihindari oleh organisasi, selain tidak sehat, keputusan yang diambil adalah dari atasan atau pimpinan biasanya

cenderung merugikan bawahan atau karyawannya, (2) organisasi sistem terbuka, yaitu suatu organisasi yang memiliki tingkat interaksi yang tinggi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sistem terbuka ini membuat suatu organisasi lebih aktif dan dinamis dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Sistem terbuka lebih mengedepankan keuntungan bersama antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dalam penyusunan kajian ini, kami memanfaatkan data sekunder yang diterbitkan atau yang disediakan oleh berbagai institusi. Selain itu, kami juga menggunakan data primer dan informasi yang kami peroleh dari hasil survei dan liaison atau hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan besar di Sulsel. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, terutama bagi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi dalam sharing pemikiran dan membantu dalam penyediaan data atau informasi yang lengkap, akurat dan terkini. Saran serta masukan dari para stakeholders sangat kami harapkan agar ke depan kajian yang kami susun menjadi semakin lebih baik.

Aktivitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan, dan melihat dari aspek ekonomi Sulsel pada triwulan I 2019 tercatat mengalami akselerasi yang lebih tinggi dari kinerja pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai (6,6%), urutan kelima tertinggi di nasional setelah Maluku Utara (7,6%), Kalimantan Utara (7,1%), Sulawesi Tengah (6,8%), dan Gorontalo (6,6%). Meskipun meningkat, angka pertumbuhan pada triwulan I 2019 tersebut berada di bawah kisaran proyeksi Bank Indonesia. Kinerja perekonomian Sulsel terutama ditopang oleh kuatnya konsumsi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), dorongan terhadap pertumbuhan secara signifikan datang dari LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri pengolahan. Sejalan dengan kinerja perekonomian, laju inflasi terkendali dengan capaian (3,08%), turun dari (3,50%) di akhir 2018 meskipun inflasi tarif angkutan udara meningkat sangat signifikan. Melanjutkan capaian di triwulan pertama, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2019 dan keseluruhan tahun 2019 kami perkirakan meningkat pada kisaran (7,0%-7,4%) dengan inflasi terkendali pada kisaran target $3,5\% \pm 1\%$ didukung oleh sinergi yang solid dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta stabilitas sistem keuangan

tetap terjaga. Pencapaian atas perkiraan tersebut tentu dapat memperbaiki tingkan kemiskinan dan kesenjangan ke depan.

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa upaya pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) sudah lebih maju dalam perizinan mendirikan bangunan melalui media informasi sehingga masyarakat mudah memahami peraturan pemerintah dalam perizinan mendirikan bangunan di kota Makassar, terlepas dari maturan tentu saja pemerintah kota dalam hal ini adalah Dinas PTSP kota Makassar mengukur kinerja mereka dengan melihat 2 faktor yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Tentu saja dengan adanya kedua faktor tersebut maka Dinas PTSP kota Makassar dapat mengetahui apa saja yang perlu di tingkatkan dan yang perlu di pertahankan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar dalam mengatasi masyarakat yang mendirikan bangunan secara ilegal maka pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media sosial media informasi agar seluruh masyarakat kota Makassar dapat mudah

mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar.

Peran Prilaku Organisasi dan Efektifitas dalam Suatu Organisasi

Efektivitas dalam suatu Organisasi Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.

Efektivitas dalam suatu organisasi merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam mencapai sasaran atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, Efektivitas organisasi

dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Namun melihat data kependudukan kota Makassar dilansir dari dinas Kependudukan dan catatan sipil, membuat DPM-PTSP kesulitan dalam melakukan pendataan dalam memberikan perizinan mendirikan bangunan di kota Makassar jumlah penduduk Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahun. Hal tersebut terlihat dari data yang dilansir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahun 2015 jumlah penduduk Kota Makassar berada di angka 1.653.386. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 ditahun 2016 menjadi 1.658.503 jiwa. Sedangkan tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 111.417. Sehingga, jumlah penduduk di Kota Makassar hingga Maret 2017 mencapai 1.769.920. Hal ini ini disampaikan Kabid Pengelolaan Data dan Informasi Dispenduk capil Makassar, Chaidir kepada berita-sulsel.com, Jumat (31/3/2017). Kata dia, bertambahnya jumlah penduduk di Kota Makassar sejalan dengan perkembangan di beberapa sektor, baik perekonomian, penataan kota yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selain itu, jelas

Chaidir, tingginya peluang lapangan kerja bagi masyarakat diluar kota menjadi penyebab utama bertambahnya jumlah penduduk Makassar.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar suda berupaya menerima masukan atau keluhan masarakat didalam periziana mendirikan bangunan tetapi perintah Dinas Penanaman Modal (PTSP) kota Makassar masih saja menemukan pelanggaran-pelanggaran masyarakat yang membangun gedung atau rumah di sepanjang jalan tanpa diketahui oleh pemerintah Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP).

Sesuai dengan tujuan penulis kita dapat melihat bahwa efektifitas pelayanan IMB di Kota Makassar memiliki banyak peminat dangan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan daerah tentunya akan bertambah sesuai dengan pembangunan yang berjalan sangat pesat, tetapi tentu saja dengan di lakukan pengawasan yang rutin agar tidak melanggar Izin Mendirikan Bangunan oleh Dinas PTSP kota Makassar, pada dasarnya pembangunan yang pesat sangat menunjang kemajuan suatu kota tetapi perlu di lakukan pengawasan oleh pihak

pemerintah secara objektif dan rutin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang merugikan banyak pihak apalagi merugikan masyarakat, sebagai dinas yang menjadi stakeholders utama dalam pelayanan pemberian izin maka Dinas PTSP kota Makassar memberikan layanan yang baik kepada siapa saja yang ingin mengurus IMB tetapi juga dengan persyaratan yang harus di penuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kantor PTSP Kota Makassar. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Dinas PTSP Kota Makassar telah memberikan layanan kepada masyarakat dengan mempermudah bentuk pengurusan sehingga terlayani dengan baik namun tentu saja memberikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan IMB di Dinas PTSP kota Makassar, (2) interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitar terkait efektivitas Pelayanan pemberian IMB oleh Dinas PTSP kota

Makassar tentunya terdiri dari beberapa metode seperti, melakukan penyadaran, pengkapasitasan, serta pendayaan. Dari metode yang di jalan pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat sudah melahirkan beberapa kepuasan sehingga program pemerintah ini bisa di katakan berjalan dengan baik, (3) eran perilaku organisasi dan evektifitas dalam suatu organisasi yakni bagaimana Dinas DPM-PTSP kota Makassar memberikan pelayanan prima serta menjadi stakeholder yang mengikuti SOP pelayanan masyarakat. Berdasarkan observasi penulis maka dapat di simpulkan bahwa Dinas PTSP kota Makassar telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan bisa di katakan sebagai suatu keberhasilan yang tentu saja tidak sempurna karena masih memiliki beberapa hal yang perlu di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. 2015 . *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : CV PUSTAKA SETIA
- A.F.Stoner Janes, dkk. 2013. *Manajemen, Edisi Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo
- Bair, Lioyd. 2011. *Managing Performance*, Jhon Wilyed Son, Inc., New York.
- Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A. 2013. *Human resource management an experimental approach*. Singapore: Mc Grauw-hill,Inc.
- Castello,S.j. 2010. *Effective performance management* . New York: Mc Gauw-Hill Componies,Inc.
- Dessler, Gary. 2011. *manajemen sumber daya manusia*. Jilid I. Edisi 10. Penerbit PT Indeks: Jakarta.
- Damin, sudarwan. 2011. *motivasi kepemeinpinan & Efektifitas kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dale Timpe. 2010. *Seri manajemen sumber daya manusia, kinerja/ Performance*. Jakarta: Elex Media Kompotindo
- Robbins. 2015. *Perilaku Organisasi*. Index. Jakarta.
- Soeprianto, Jhon. 2010. *penilaian kinerja dan pengembangan kariyawan*, Edisi pertama, Cetakan kelima BPPFE, Yogyakarta.
- Steers Richard. M. 2010. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Udekusuma. 2013. *Performance manajemen*. University of Indonesia Samad.
- Yukl , Gary. 2015. *Leadership in Organisations*. Terjeman jusuf udayana. *Kepeminpian dalam Organisasi*. Edisi 3. Penerbit Prenhalindoh, Jakarta.